

JURNAL
KEBIJAKAN KIM JONG IL TERHADAP PENGEMBANGAN NUKLIR DI KOREA UTARA
TAHUN 1998-2008(1)
(THE GOVERNMENT ABILITY OF KIM JONG IL FOR NUCLEAR DEVELOPMENT IN
KOREA UTARA AT 1998-2008)

Anita Ferawati

Mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret(2)

Abstract

North Korea is a country located in the northern part of the Korean peninsula at latitude 37° 43° N and longitude 124° 131° E. In North Korea, all residents must follow the draft. Military force was formed to protect North Korea from attacks another country, and as one of the policy to cover the hunger problem in the country due to the bad economy. The head of government is the first North Korea Kim Il Sung, who was a freedom fighter. Around 1990, Kim Il Sung died of the World. Before his death, the government has handed over to Kim Jong Il. Kim Jong Il was born in the Soviet time parents fought Japanese troops in North Korea. After four years, Kim Jong Il returned to Pyongyang. In 1998, Kim was inaugurated as the position of the highest positions in the State of North Korea (Selig. S. Harrison. 2002).

North Korea to modernize the country by focusing the power of the state in economic planning, heavy industry and military development. North Korea improve the economy by developing nuclear energy instead of electric energy. In addition, the development of nuclear energy has the objective for national defense and security (Kompas, May 12, 2003).

However, the United States was worried about North Korea's nuclear development program because it can threaten the stability of the Korean Peninsula. For the United States the North Korean nuclear issue to be taken seriously, so that the United States tried to pressure North Korea to halt its nuclear development program (Tempo, February 12, 1994). Through economic ties and integration with the international North Korea Pyongyang aims to have awareness of the importance of maintaining regional and international peace, including with South Korea.

Key words: North Korea's nuclear development program, international relations.

Pendahuluan

Korea merupakan salah satu negara yang terletak di belahan bumi bagian timur, di Semenanjung kawasan Asia Timur Laut. Negara Korea menghubungkan Asia Timur Laut dengan dunia luar terutama dengan kepulauan Jepang yang letaknya dekat dengan Semenanjung Korea. Posisi geografi Semenanjung Korea yang strategis menyebabkan Korea mempunyai arti penting sebagai penghubung antara negara di kawasan Timur

Tengah dengan negara di kawasan Asia. Selain itu, Korea berada di tengah tiga negara besar yaitu Jepang, China, dan Rusia (Yang S. Y dan Mas'ood M. 2003: 1).

Menurut Justinjojo (2011), Korea pernah menjadi sebagian wilayah kekaisaran Jepang mulai tahun 1910 hingga tahun 1945. Meskipun Jepang membangun jaringan jalan raya dan komunikasi modern, kehidupan rakyat Korea masih sangat tradisional. Pada tahun 1945, terjadi Perang Dunia II yang dimenangkan oleh pihak Sekutu (Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, Belgia, Belanda), sehingga Kaisar Jepang harus menyerahkan wilayah Korea kepada Sekutu. Pembagian Korea menjadi Korea Utara dan Korea Selatan terjadi pada saat Korea dikuasai Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat dan Uni Soviet mengadakan pertemuan untuk membahas pendudukan Negara Korea sebagai wilayah perwalian. Tujuan perwalian ini yaitu untuk mendirikan pemerintahan sementara pada Negara Korea, yang akan mendapat kebebasan dan merdeka pada waktunya.

Pada tanggal 19 September 1945, seorang tokoh masyarakat yang bernama Kim Il Sung dipilih oleh sebuah komando polisi rahasia Uni Soviet untuk memimpin 40 warga Korea Utara yang mengungsi di Uni Soviet untuk kembali ke Pyongyang dan membuat formasi pemerintahan provinsi wilayah utara atau Komite Kerakyatan Korea Utara. Perwakilan dari seluruh masyarakat Korea membentuk *Democratic People's Republic of Korea (DPRK)*, yang kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 9 September 1948. Pemerintah Uni Soviet memberikan komando kepada Kim Il Sung untuk menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan serta menjabat sebagai ketua Komite Pusat Partai Buruh Korea *Korean Worker's Party (KWP)*. Selain itu, Kim juga memegang kendali atas militer Korea Utara. Sehingga, semua pejabat pemerintahan harus tunduk kepada Kim Il Sung dan setiap pejabat yang memiliki ideologi berbeda dengan Kim, akan menerima sanksi yaitu dikeluarkan dari kedudukannya di partai buruh tersebut. Hal itu dilakukan untuk melindungi pemerintahan yang mempunyai kekuasaan turun temurun.

Presiden Kim Il Sung meninggal pada tanggal 8 Juli 1994 di usia 82 tahun karena serangan jantung. Adanya musibah kematian Kim Il Sung membuat Korea Utara harus mempersiapkan seorang pengganti yaitu seorang putra yang bernama Kim Jong-Il, yang secara resmi mendapat gelar Sekjen Partai Buruh Korea dan Ketua Komisi Pertahanan Nasional pada 8 oktober 1997. Pada tahun 1998, posisi Kim diresmikan sebagai posisi tertinggi di Korea Utara. Sejak peresmian tersebut, Kim Jong Il diangkat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Korea Utara (Hendarsah, 2007).

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan kebijakan pemerintah Kim Jong Il di Korea Utara tahun 1998-2008, pengembangan Nuklir

masa Kim Jong Il di Korea Utara tahun 1998-2008, tanggapan negara lain terhadap pengembangan nuklir di Korea Utara tahun 1998-2008.

Pada tahun 1988, Korea Selatan berhasil menyelenggarakan Olimpiade dengan sukses dan Korea Utara juga berhasil mengembangkan berbagai macam senjata modern yakni program *“plutoniumbased nuclear”* dan *“highly-enriched-uranium (HEU) nuclear program”*. Korea Utara memproduksi plutonium untuk pembuatan senjata nuklir. Korea Utara merupakan negeri yang unik, meskipun hampir seluruh penduduknya hidup dalam kemiskinan, pemerintahnya masih tetap bisa menggunakan uang jutaan dolar untuk keperluan persenjataan (Yang. Y. S dan Mas’oed. M, 2003 : v).

Pemerintah Korea Utara mementingkan militer untuk memperkuat pertahanan dari serangan negara lain. Pertahanan Korea Utara terus dikembangkan, karena pemerintah Kim telah membuka program pengembangan nuklir. Pengembangan tersebut baik bagi Korea Utara, namun program ini telah mengganggu ketenangan negara lain. Korea Utara mempunyai alasan dalam mengembangkan nuklir, yaitu untuk menjaga keamanan negara dari pengaruh negara adikuasa seperti Amerika Serikat. Tujuan akhir kebijakan politik itu adalah membangun negara yang kuat, yang tidak dapat diancam oleh invasi asing.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana penerapan kebijakan Kim Jong Il di Korea Utara tahun 1998-2008, (2) bagaimana pengembangan nuklir masa Kim Jong Il di Korea Utara tahun 1998-2008, (3) bagaimana tanggapan negara lain terhadap pengembangan nuklir di Korea Utara tahun 1998-2008.

Pada tahun 2002, Kim Jong-il mengaku memiliki senjata nuklir yang diproduksi sejak 1994. Pemerintah berpendapat produksi rahasia itu diperlukan untuk tujuan keamanan seperti Amerika Serikat yang memiliki senjata nuklir di Korea Selatan. Pengakuan tersebut memunculkan ketegangan baru dengan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden George W. Bush (Kompas, 22 Maret 2002).

Sejak tahun 2002, krisis nuklir Semenanjung Korea terjadi kembali. Cina sangat memerhatikan program nuklir dan misil Korea Utara. Hal itu dikarenakan Cina memerlukan lingkungan yang stabil untuk bisa berkonsentrasi dalam pembangunan ekonominya. Cina khawatir bahwa program nuklir Korea Utara akan mengakibatkan kemunduran kerjasama ekonomi dengan Jepang. Cina telah berperan besar dalam *Six Party Talks* dan berusaha keras membujuk Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya (Kompas, 16 Juni 2003).

Pada bulan Juli tahun 2009, Korea Utara juga telah melakukan uji coba tujuh buah misilnya, termasuk satu kali kegagalan terhadap misil jarak jauh. Uji coba yang dilakukan oleh Korea Utara dianggap telah menciptakan ancaman sangat serius bagi Amerika Serikat

dan sekutunya yang sedang mencoba untuk menguasai negara-negara yang tidak berpihak kepada mereka. Akibatnya, pejabat tinggi di Washington merencanakan untuk menggunakan “*preemptive attack*” terhadap tempat-tempat pembuatan nuklir di Korea Utara dalam jangka waktu dekat ini. Terdapat beberapa alasan terhadap pengembangan nuklir Korea Utara. *Pertama*, Pyongyang berusaha berkomunikasi dengan Korea Selatan yang selama ini merasakan sikap permusuhan dari Korea Utara. *Kedua*, Korea Utara menginginkan perhatian Washington. *Ketiga*, pemerintahan Korea Utara bermaksud untuk memperkuat legitimasi politik pengganti Kim Jong Il, Kim Jong Un. *Keempat*, Pyongyang bermaksud mengembangkan gudang senjata nuklir untuk digunakan melawan Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat (Kompas, 10 Oktober 2006).

Kajian Teori

1. Hubungan Internasional

Secara sederhana pengertian Hubungan Internasional dipahami sebagai interaksi yang terjadi antara orang-orang tertentu, di mana interaksi tersebut telah melampaui batas yurisdiksi nasional sebuah negara. Pada dasarnya, tujuan utama studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional yaitu perilaku aktor, negara maupun non negara, di dalam arena transaksi internasional, di mana perilaku tersebut bisa berupa perang, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya (Mas'oed, 1994: 31). Korea Utara merupakan negara yang tertutup terhadap pengaruh negara lain. Akan tetapi, pemerintah Pyongyang melakukan kerjasama dengan negara Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Amerika Serikat juga mencoba memberikan pengaruhnya kepada Korea Utara. Kerjasama di bidang perekonomian memberikan sedikit kemajuan, karena pemerintah masih membutuhkan bantuan negara lain. Oleh karena itu, pemerintahan Kim Jong Il menggerakkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sendiri dengan membangun beberapa pabrik dan mengembangkan teknik pertanian. Pengaruh ekonomi paling kuat yaitu Cina, karena Cina menggunakan Korea Utara sebagai jalur perdagangan. Selain ketiga negara tersebut, Korea Utara juga melakukan hubungan dengan Uni Soviet.

2. Kebijakan

Menurut Nasution (1989), kebijakan adalah arah tindakan yang direncanakan untuk mencapai sesuatu sasaran. Dalam hal ini terdapat tiga masalah. *Pertama*, kebijakan luar negeri suatu negara menunjukkan dasar-dasar umum yang dipakai pemerintah untuk bereaksi terhadap lingkungan internasional. Di lain pihak, suatu kebijakan merupakan arah tindakan yang ditujukan pada satu sasaran, maka suatu negara akan mempunyai banyak macam kebijakan karena banyaknya sasaran yang ada padanya. Masalah *kedua*, suatu

kebijakan selalu menyangkut keputusan dan tindakan. Tindakan untuk mencapai sasaran dapat dihasilkan dari kebijakan, apabila keputusan itu merupakan hasil dari pemikiran yang membuat kebijakan.

Pemerintah Korea Utara menggunakan kebijakan ekonomi dengan membangun beberapa pabrik yang semua modal berasal dari Korea Selatan. Perekonomian di masa Kim Jong Il mengalami keterpurukan. Untuk menutupi hal tersebut maka Kim menggunakan kebijakan pengembangan nuklir. Tujuannya ialah untuk mendapatkan perhatian dari negara lain dan pertahanan terhadap serangan negara lain. Korea Utara juga mengembangkan kebijakan militer. Seluruh masyarakat Korea Utara diwajibkan untuk mengikuti wajib militer. Semua itu dilakukan untuk melindungi pemerintahan dan untuk mencari bantuan dalam pemenuhan kebutuhan. Adanya pengembangan nuklir telah menarik perhatian berbagai negara. Ancaman dan protes mengalir kepada pemerintahan Kim Jong Il. Untuk mencegah adanya perselisihan yang menyebabkan perang maka pemerintah Kim dianjurkan untuk menonaktifkan program nuklir dengan diganti bantuan ekonomi dari negara lain.

3. Kekuasaan

Wewenang, Delegasi dan Pengaruh kekuasaan sebagaimana dinyatakan Noviyanto (2009), bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain, artinya kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku individu atau kelompok. Jika setiap individu mengadakan interaksi untuk memengaruhi tindakan satu sama lain, maka yang muncul dalam interaksi tersebut adalah pertukaran kekuasaan. Kekuasaan juga berarti kemampuan untuk memengaruhi individu, kelompok, keputusan, atau kejadian. Kekuasaan tidak sama dengan wewenang, namun wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik dalam organisasi.

Kekuasaan Kim Jong Il berlaku secara turun temurun. Awal pemerintahan keluarga Kim yaitu setelah Korea Utara merdeka dari penjajah Jepang. Pemimpin pertama yaitu Kim Il Sung, kemudian digantikan oleh Kim Jong Il. Untuk persiapan setelah kematian Kim Jong Il telah disiapkan Kim Jong Un. Meskipun masih muda, Kim Jong Un harus memerintah rakyat Korea Utara dengan bantuan dari para petinggi pemerintahan Korea Utara masa Kim Jong Il.

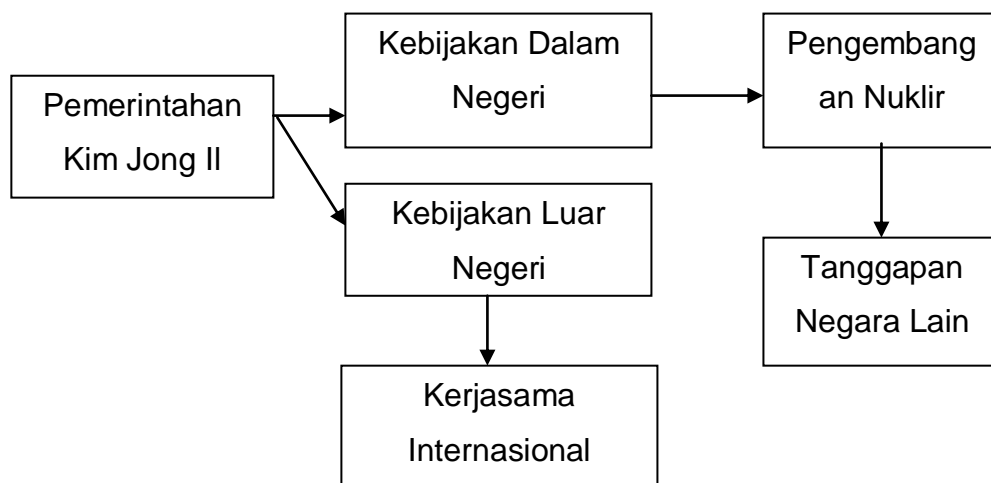
4. Nuklir

Senjata nuklir ternyata telah melampaui permasalahan kemiliteran dan lebih berkembang menjadi permasalahan politik dan ekonomi. Semua ini menumbuhkan masalah-masalah baru dalam sistem internasional. Perkembangan nuklir terus berlanjut dan tak bisa dibayangkan daya rusak yang ditimbulkannya. Terdapat jenis peluru kendali berkepala nuklir yang mampu mencapai sasaran ribuan mil jauhnya dari tempat peluru

tersebut diluncurkan, yang dikenal sebagai peluru kendali antarbenua. Hal ini menunjukkan bahwa peluru kendali jarak jauh tersebut memiliki daya jangkauan yang lebih jauh di samping daya rusak yang makin dahsyat (Nasution, 1989).

Korea Utara mengembangkan nuklir dengan teknik fisi yang dapat menghasilkan ledakan cukup besar dan dapat pula dijadikan sumber tenaga listrik. Adanya nuklir tersebut, Korea Utara berhasil membuat negara lainnya khawatir terutama Amerika Serikat. Untuk mencegah peluncuran senjata nuklir maka negara-negara lain mengadakan pertemuan dan perjanjian mengenai senjata nuklir.

Kerangka Berpikir



Berdasarkan uraian pada kerangka teori tersebut, Kim Jong Il merupakan pemimpin yang berani dan tegas dari Korea Utara mulai tahun 1994 sampai 2011. Masa kepemimpinannya mempunyai sejarah yang menarik diantaranya adalah membuat suatu kebijakan militer dengan mengembangkan senjata nuklir yang digunakan sebagai alat untuk mengimbangi kekuatan Amerika Serikat yang telah lebih dahulu memberi senjata pada Korea Selatan. Kim juga membuat kebijakan dalam negeri di bidang ekonomi misalnya menumbuhkan kemandirian masyarakat Korea Utara untuk memproduksi makanan sendiri dari tanah pertanian. Empat tahun setelah Kim dinobatkan menjadi presiden Korea Utara, peluncuran nuklir berhasil dilakukan. Uji coba yang dilakukan Korea Utara mendapatkan kecaman yang cukup serius dari berbagai negara.

Metodologi

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian masa lampau, oleh karena itu metode yang digunakan adalah metode historis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian dengan metode historis adalah sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik berasal dari kata Yunani *heurishein* yang artinya memperoleh. Dalam pengertian lain, menurut G.J. Reiner yang dikutip oleh Dudung Abdurahman (2011), "heuristik adalah suatu teknik, suatu seni dan bukan suatu ilmu" (hlm. 104). Pada tahap ini diusahakan untuk mencari dan menemukan sumber-sumber tertulis berupa buku-buku yang relevan dan surat kabar. Sumber tertulis primer berupa arsip yang meliputi: Artikel-artikel dalam surat kabar yang ditulis mengenai keberhasilan Korea Utara yang mencoba mengetes nuklirnya seperti Kompas edisi 10 Oktober 2006 yang berjudul Korea Utara berhasil tes senjata nuklir, edisi 11 Oktober 2006 sanksi baru PBB ancam Korea Utara, Kompas, 22 april 2003 yang berjudul Korea Selatan terima tawaran Korea Utara dan beberapa sumber primer lainnya. Sumber data sekunder yang digunakan seperti penelitian-penelitian yang telah dibukukan berjudul 11 Macan Asia Musuh Amerika karya Amir Hendarsah, Masyarakat Politik Dan Pemerintahan Korea karya Young Geung Youn, Nuclear Development In Asia karya Chuanwen Hu dan Wroite Georg dan sumber sekunder lainnya.

2. Kritik

Kritik yaitu kegiatan untuk menyelidiki apakah sumber-sumber sejarah itu sejati atau otentik dan dapat dipercaya atau tidak. Pada tahap ini kritik sumber dilakukan dengan dua cara yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Menurut Dudung Abdurahman (2011), "kritik ekstern yaitu menguji suatu keabsahan tentang keaslian sumber (otentisitas) sedangkan kritik intern menguji keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas)".

Kritik ini bertujuan untuk menguji apakah isi, fakta dan cerita dari suatu sumber sejarah dapat dipercaya dan dapat memberikan informasi yang diperlukan. Misalnya dengan membaca Artikel uji coba nuklir tentang keberhasilan dalam peluncurannya, artikel Jepang dan Cina dalam menanggapi uji coba nuklir Korea Utara, buku karangan Young Seung Youn, buku karangan Amir Hendarsah. Dengan demikian kritik intern dapat dilakukan untuk melihat seberapa relevan tulisan-tulisan tokoh tersebut mendukung karya peneliti.

3. Interpretasi

Menurut Nugroho Notosusanto (1978), "interpretasi adalah suatu usaha menafsirkan dan menetapkan makna serta hubungan dari fakta-fakta yang ada, kemudian dilakukan perbandingan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain, sehingga terbentuk rangkaian yang selaras dan logis" (hlm. 40).

Kegiatan menyeleksi dan menafsirkan tulisan buku dalam penelitian ini dilakukan dengan penentuan periodisasi, merangkaikan data secara berkesinambungan, misalnya dengan merangkaikan periode sejarah dan menghubungkan sumber data sejarah yang ada pada tulisan Amir Hendarah dengan biografi Kim Jong Il, US-Korean Relation karya Byoung Yong Lee, Masyarakat Politik Dan Pemerintahan Korea karya Young Geung Youn, artikel tentang uji coba nuklir dan tanggapan negara lain, sehingga menjadi kesatuan yang harmonis dan masuk akal melalui interpretasi. Dalam kegiatan interpretasi ini, penelitian yang dilakukan harus bersikap obyektif disebabkan keanekaragaman data yang diperoleh.

4. Historiografi

Historiografi adalah kegiatan menyusun fakta sejarah menjadi suatu kisah. Menurut Helius Sjamsuddin (1992), "historiografi merupakan kegiatan menyampaikan hasil sintesa fakta-fakta yang diperoleh dalam bentuk kisah sejarah" (hlm. 153). Historiografi merupakan langkah terakhir dari metode sejarah untuk menyampaikan susunan fakta sejarah dalam bentuk penulisan sejarah berdasarkan bukti berupa sumber-sumber data sejarah yang dikumpulkan, dikritik, dan diinterpretasi. Historiografi dalam penelitian diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul "Kebijakan Kim Jong Il Terhadap Pengembangan Nuklir di Korea Utara Tahun 1998-2008".

Hasil Penelitian

Kemajuan hubungan antarkorea diikuti pula dengan berbagai macam masalah yang besar. Beberapa di antaranya adalah masalah pembentukan struktur kekuatan politik yang baru di sekitar semenanjung Korea, masalah perbedaan pendapat umum terhadap sistem pemerintahan Korea Utara, dan reunifikasi serta ideologi.

Pertumbuhan ekonomi selama 3 dekade terakhir mengalami pertumbuhan lebih dari 15% per tahun, dengan tenaga nuklir sebagai kebutuhan yang penting sejak tahun 1970. Keadaan ekonomi Korea Utara sangat buruk di tahun 1990an. Selain itu, Korea Utara mengalami banjir, pengelolaan lahan yang buruk dan ketidakmampuan untuk mengimpor barang yang diperlukan untuk mempertahankan industri. Keadaan yang memburuk tersebut membuat Kim Jong Il melakukan perubahan kebijakan ekonomi yang digabung dengan kebijakan militer untuk memperkuat negara (KunMo Chung, 1990: 13).

Krisis nuklir Korea Utara dimulai pertama kali saat Korea Utara menarik diri dari *NPT* (Perjanjian non-proliferasi nuklir) pada tahun 1993. Korea Utara menandatangani pernyataan sepakat untuk menaati perjanjian *NPT* itu dengan *IAEA* (Badan tenaga atom internasional) pada Januari 1992. Sebagai syarat untuk perjanjian itu, pihak *IAEA*

melakukan 6 kali inspeksi di Korea Utara dan menemukan bukti yang mencurigakan bahwa beberapa kilogram plutonium yang bisa membuat senjata nuklir telah diekstrak, karena ada selisih sebanyak 90 gram dari yang dilaporkan oleh Korea Utara pada awalnya. Berdasarkan hasil itu, *IAEA* segera meminta pelaksanaan inspeksi khusus, namun Korea Utara menolak permintaan itu dan menarik diri dari *NPT* sebagai aksi protes.

Amerika Serikat menghendaki Korea Utara menghentikan program pengembangan senjata nuklir untuk ditukarkan dengan bantuan ekonomi, tetapi pemerintah Korea Utara mengumumkan bahwa Korea Utara telah keluar dari keanggotaan *Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT)*, yaitu suatu kesepakatan untuk tidak mengembangkan nuklir yang disetujui oleh seluruh Negara di dunia pada tahun 1993. Korea Utara menyatakan keluar dari *NPT* karena ada tekanan dari Amerika Serikat untuk menghentikan program pengembangan nuklir di Korea Utara (Park. K.Y., 2009: 99).

Keadaan kawasan Asia Timur sendiri masih tidak menentu sebagai akibat dari adanya konflik-konflik ketegangan di Semenanjung Korea, Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan sehingga masih jadi pertimbangan bagi redefinisi ini. Pada perkembangan selanjutnya, krisis di Semenanjung Korea tahun 1994 (dengan adanya pengumuman pengunduran diri Korea Utara dari *International Atomic Energy Agency (IAEA)*), menjadi salah satu pendorong redefinisi pedoman kerjasama pertahanan bilateral tersebut (Wicahyani, 2010). Pengembangan senjata nuklir Korea Utara dapat membuat aliansi Amerika Serikat dengan Korea Selatan ataupun Jepang semakin kuat. Mereka juga akan cenderung mempererat komitmen untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan bahkan mungkin peningkatan teknologi militer guna menangkal nuklir Korea Utara.

Pembahasan Hasil Penelitian

Korea Utara merupakan negara yang bergantung pada pertanian, apabila bahan untuk bertani berkurang atau menipis dan pemerintah tidak dapat mencukupinya maka akan terjadi suatu kondisi yang buruk. Untuk mengatasi hal tersebut, kepala pemerintahan membuat kebijakan ekonomi dan militer. Perwujudan kebijakan itu mulai berkembang pada masa Kim Jong Il. Kim Jong Il merupakan putra dari presiden pertama Korea Utara, Kim Il Sung. Kim lahir di Soviet saat orang tuanya berjuang melawan tentara Jepang di Korea Utara. Sekitar tahun 1990an, Kim Il Sung meninggal Dunia. Sebelum kematiannya, pemerintahan telah diserahkan kepada Kim Jong Il (Selig. S. Harrison. 2002).

Kim Jong Il adalah seseorang yang membuktikan kemampuannya untuk menjadi seorang pemimpin kuat dan meneruskan membentuk ekonomi secara sistematis atau membangun perekonomian yang kemudian berusaha untuk maju secara mandiri. Masalah perekonomian yang buruk, menimbulkan kelaparan dimana-mana sehingga Kim berusaha

membuat pengadaan kebutuhan secara mandiri. Kepemimpinan Kim Jong Il terlihat kuat dan melindungi rakyatnya tetapi sumber berita tentang pemerintahan Korea Utara sangatlah tertutup. Ia berbeda dengan ayahnya. Kim Jong Il membuat struktur konstitusional baru yaitu menyediakan angkatan-angkatan bersenjata untuk melindungi dirinya dan menempatkan suatu pertemuan para pengusaha untuk tujuan politik. Dapat dikatakan Korea Utara sudah mempunyai banyak kup militer yang siap bertempur. Masa inilah sebagai masa peralihan dari Kim Jong Il untuk mengganti suatu rezim tanpa feodalisme yang merajalela dengan adanya kekuatan militer (Selig, S. Harrison. 2002).

Masalah penyatuan Semenanjung Korea menimbulkan perbedaan ideologi di dalam masyarakat Korea Selatan dan Korea Utara. Sejak tahun 1945, kedua negara tersebut mengembangkan kebijakan reunifikasinya masing-masing. Kini, Korea Selatan memiliki kebijakan unifikasi konfederasi, sementara Korea Utara menuntut kebijakan yang diberi nama unifikasi federasi tingkat rendah. Adanya kedua kebijakan reunifikasi semenanjung Korea tersebut, membuat rakyat Korea tidak bisa menentukan ideologi masing-masing. Pertemuan yang ada di Pyongyang, mengakibatkan kedua pemimpin tertinggi masing-masing negara menyetujui wewenang diplomasi, pertahanan dan penyusunan undang-undang tingkat rendah, yang semuanya akan diberikan kepada pemerintah regional. Sistem itu hampir sama dengan usulan reunifikasi Korea Selatan. Beberapa tahun kedepan dengan momentum persetujuan antara presiden Dae Jung dengan presiden Kim Jong Il, Korea Selatan dan Korea Utara akan bisa menuju arah yang hampir sama dengan proses sistem konfederasi sebelum tahap reunifikasi Korea (KBS World, 2006).

Korea Utara mengalami keadaan yang buruk, sehingga membuat Kim Jong Il melakukan perubahan kebijakan ekonomi yang digabung dengan kebijakan militer untuk memperkuat negara dan rezim Kim. Korea Utara memiliki senjata aktif rudal nuklir dan balistik yang telah dilaporkan pada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa sekitar 1695 senjata bulan Juli 2006, 1.718 senjata bulan Oktober 2006, dan 1874 senjata bulan Juni 2009. Menurut pemerintah Korea Utara, kebijakan ini dapat menghasilkan tingkat pertumbuhan yang positif meskipun bahan makanan terus bergantung pada bantuan asing. Di tahun 1990an, pemerintah mulai menyetujui beberapa kegiatan skala kecil seperti barter dan perdagangan. Pada tahun 2002, Kim Jong-il menyatakan bahwa uang harus mampu mengukur nilai semua komoditas. Oleh karena itu, pemerintah mulai melakukan kerjasama dengan negara lain. Sikap tersebut meniru dari China karena Kim mengagumi kemajuan ekonomi China yang mengalami perkembangan yang cepat (KBS World, 2006).

Kim Jong Il menggunakan strategi nasional dengan semboyan politik yang mengutamakan militer yang bertujuan untuk memelihara rejim keluarga Kim. Pemerintah

Korea Utara mementingkan militer untuk memperkuat pertahanan dari serangan negara lain. Pertahanan Korea Utara sangat penting, karena pemerintah telah membuka program pengembangan nuklir. Program ini dapat membahayakan bagi semua makhluk dan mengganggu ketenangan negara lain atas pembuatan senjata nuklir, sehingga memerlukan penjagaan yang ketat. Jikalau mungkin terjadi perang nuklir maka akibatnya akan ke seluruh permukaan bumi.

Menurut Sarwiyantari (2008), walaupun sudah mengetahui dahsyatnya akibat bom nuklir yang di jatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Korea Utara tetap melanjutkan percobaannya. Uji coba yang pertama dilakukan kurang berhasil pada 9 Oktober 2006, yang dilaksanakan di sebuah terowongan gunung di pantai timur wilayahnya. Ledakan ini menimbulkan gempa berkekuatan 4,2 Mb (*body wave magnitude*). Uji coba ini langsung diprotes banyak negara, terutama negara tetangga terdekatnya Korea Selatan dan Jepang. Korea Utara tidak memperhatikan semua bentuk protes tersebut. Uji coba dilaksanakan lagi pada 25 Mei 2009. Senjata nuklir ini ditanam sedalam 300 m dibawah permukaan tanah. Ledakan dahsyat kembali menggetar dan membuat gempa yang berkekuatan 4.7 Mb (*body wave magnitude*), menjalar di permukaan tanah. Untuk uji coba ini Dewan Keamanan PBB sudah mempersiapkan sanksi baru untuk Korea Utara.

Amerika Serikat memiliki informasi mengenai program senjata Korea Utara berbahan dasar plutonium. Korea Utara memiliki bahan bakar yang dapat membuat delapan hingga sepuluh bom nuklir. Bahan bakar tersebut telah diolah kembali untuk dibuat plutonium. Korea Utara memulai kembali riset reaktornya di Yongbyon untuk memproduksi lebih banyak plutonium. Situasi semakin rumit ketika pada tanggal 4 Juli 2006 Korea Utara melakukan uji coba sedikitnya enam rudal, termasuk rudal jarak jauh Taepodong-2. Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara atas uji coba rudalnya. Resolusi PBB tersebut berisi larangan ekspor dan impor materi rudal Korea Utara.

Selain itu, pemerintah Amerika Serikat memilih kebijakan intervensi dalam urusan internasional dan menunjukkan sikap tegas terhadap Korea Utara. Pemerintah Amerika Serikat dibawah pemerintahan Presiden Bill Clinton meminta Korea Utara supaya menerima pengawasan senjata nuklir dan masuk kembali ke dalam NPT. Amerika meminta Korea Utara untuk menerima tim pemeriksa *International Atom Energy Assosiation (IAEA)*, Badan Energi Atom Internasional. Di lain pihak, Amerika Serikat bersama Korea Selatan mengadakan latihan perang untuk menggertak Korea Utara. Usaha Amerika Serikat dan IAEA melakukan inspeksi instalansi nuklir Korea Utara di Yongbyon tersebut ditolak, kemudian Pyongyang diberi waktu untuk memenuhi tuntutan IAEA. Jika tetap menolak

inspeksi IAEA, maka Dewan Keamanan PBB akan memberlakukan embargo ekonomi (Tempo, 12 Februari 1994).

Korea Utara tidak memedulikan himbauan Amerika Serikat, bahkan Korea Utara terus meningkatkan percobaan mesin baru untuk peluru kendali (rudal) jarak jauh. Sebaliknya, Amerika Serikat terus mempermasalahkan pengembangan teknologi sistem senjata nuklir Korea Utara. Amerika Serikat sesungguhnya khawatir karena rudal Korea Utara dapat menjangkau Alaska. Di samping itu, Korea Utara mengirimkan beberapa teknologi rudal kepada suatu negara yang tidak memiliki pengaruh Amerika Serikat (Mohammad Shoelhi, 2003).

Untuk menindaklanjuti perumusan strategi Amerika Serikat di Asia Timur tersebut maka pemerintahan Clinton mengadakan perjanjian kerjasama dengan pemerintah Jepang. Pada Februari 1995 Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengeluarkan dokumen yang berjudul *United States Security Strategy for the East Asia-Pacific Region*. Dokumen ini secara menyeluruh menjelaskan tentang strategi pemerintahan Clinton terhadap masalah keamanan di kawasan Asia Pasifik dan mengklarifikasi kebijakan dasar yang ada dalam *Joint Declaration*. Di dalam dokumen itu menjelaskan mengenai karakteristik kehadiran pasukan militer Amerika Serikat di Asia sebagai suatu elemen yang tidak terpisahkan dari stabilitas dan perdamaian.

Joint Declaration secara spesifik mendefinisikan peranan yang harus dilakukan masing-masing negara untuk memperkuat kerjasama pertahanan sebagai landasan dalam hubungan kerjasama antara kedua negara, dan ekspresi keinginan kedua negara untuk lebih memperdalam kerjasama keamanan. Hasil tersebut kemudian diwujudkan dalam *The Japan-U.S. Joint Declaration on Security* yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton dan Perdana Menteri Jepang, Ryutaro Hashimoto pada tanggal 17 April 1996. *Joint Declaration* ini menandai awal dari proses penerimaan undang-undang revisi *Guidelines* oleh Jepang. *Joint Declaration* ini sekaligus juga menandakan bahwa kerjasama keamanan Jepang-Amerika Serikat tetap berlanjut dan memiliki signifikansi pada pasca Perang Dingin.

Menurut Wicahyani (2010), Korea Selatan sebagai negara terdekat dan memiliki ikatan sejarah yang sangat kuat dengan Korea Utara, maka program nuklir Pyongyang mempengaruhi dan mengancam keamanan Korea Selatan. Korea Selatan tidak ingin merasakan kembali Perang Korea seperti pada tahun 1950-1953, yang menelan banyak korban. Oleh sebab itu, setiap kemajuan yang dilakukan Korea Utara terutama yang berkaitan dengan persenjataan maupun militer pasti akan mempengaruhi kebijakan serta tindakan pertahanan Korea Selatan. Dalam merespon ancaman nuklir Korea Utara, Korea

Selatan melakukan dua sikap. *Pertama*, meminta jaminan perlindungan dari Amerika Serikat dengan mempererat kerangka kerja aliansi antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. *Kedua*, meningkatkan kapabilitas pertahanan konvensional. Setiap tahun, ketika Korea Selatan merasa bahwa program nuklir Korea Utara mengalami kemajuan, maka Korea Selatan perlahan-lahan mulai memperhitungkan untuk mengembangkan program misil dan nuklir. Dalam hal ini, upaya yang digunakan untuk menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara di Semenanjung Korea berupa proses *Confidence Building Measures (CBM)*. CBM ini dilakukan dalam berbagai bentuk, yang salah satunya berupa *sunshine policy* yakni tanpa mengisolasi tapi dengan pengiriman bantuan ekonomi bagi kelangsungan rezim Korea Utara dilakukan oleh Korea Selatan dan negara-negara sekitar semenanjung termasuk Jepang serta mempertemukan kembali kedua keluarga yang terpisah akibat perang Korea.

Sejak tahun 2002, krisis nuklir Semenanjung Korea terjadi kembali dan Cina sangat memperhatikan program nuklir Korea Utara. Hal tersebut dikarenakan Cina memerlukan lingkungan yang stabil untuk bisa berkonsentrasi dalam pembangunan ekonominya. Cina khawatir bahwa program nuklir Korea Utara akan mengakibatkan efek domino dan memberikan kesempatan bagi Jepang untuk mengembangkan kapabilitas nuklir dan misilnya. Cina telah berperan besar dalam *Six Party Talks* dan berusaha keras untuk membujuk Korea Utara dalam menghentikan program nuklirnya. Cina telah bekerjasama dengan komunitas internasional untuk menghadang proliferasi misil ataupun nuklir di Asia Timur (Kompas, 16 Juni 2003).

Perubahan situasi internasional telah membuat Cina merasa perlu untuk melakukan modernisasi kapabilitas pertahanan nasionalnya semata-mata untuk tujuan pertahanan. Sementara Amerika Serikat memiliki gudang nuklir terbesar di dunia, menyediakan perlindungan nuklir bagi sekutu-sekutunya di Asia Timur. Cina harus bergantung pada dirinya sendiri untuk menangkal kekuatan nuklir dalam mempertahankan kedaulatan serta integritas teritorialnya dari ancaman nuklir Korea Utara.

Dari apa yang terjadi di negara-negara Asia Timur, pengembangan senjata nuklir Korea Utara telah membuat kawasan Asia Timur semakin kompleks dan tidak menentu. Pengembangan nuklir tersebut menimbulkan reaksi berantai yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan Asia Timur. Bahkan uji coba atau penempatan nuklir Korea Utara tidak membuat Jepang, Korea Selatan, ataupun Taiwan untuk menjadi negara nuklir, namun dapat mengakibatkan perlombaan senjata konvensional di Asia Timur. Selain itu, pengembangan senjata nuklir Korea Utara dapat membuat aliansi Amerika Serikat dengan Korea Selatan ataupun Jepang semakin kuat. Mereka juga akan cenderung mempererat

komitmen untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan bahkan mungkin peningkatan teknologi militer guna menangkai nuklir Korea Utara.

Kesimpulan

Korea Utara menjadi negara yang mempunyai masalah dalam politik internasional. Negara komunis ini berada di kawasan yang secara politis sangat mudah jatuh dalam konflik. Ditunjang instabilitas Korea Utara, bahaya nuklir menjadi sangat nyata. Ketika satu negara merasa terancam dengan senjata nuklir Korea Utara, negara tersebut akan meningkatkan persenjataannya. Langkah ini dengan segera diikuti oleh tetangga lain dalam kawasan itu yang memang memiliki hubungan yang rentan.

Oleh karena itu, komunitas internasional perlu berhati-hati menyikapi program nuklir Korea Utara. Mereka harus menebak arah yang diinginkan Korea Utara. Sejak awal perundingan nuklir yang diprakarsai oleh Amerika Serikat di bawah pemerintahan Bill Clinton, ada dorongan yang kuat mengenai insentif finansial. Semua ini sangat dibutuhkan Korea Utara yang miskin dalam mewujudkan cita-cita sebagai negara yang kuat dan makmur. Maka nuklir dijadikan alat untuk mengamankan kekuatan diplomatik Korea Utara.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang diperoleh, dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa sejarah dan generasi muda, semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam memahami masalah yang terjadi di dunia Internasional terutama di kawasan Asia Timur. Mahasiswa juga perlu mengetahui bahaya dari senjata nuklir. Sehingga dapat berhati-hati saat melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan nuklir.
2. Bagi guru sejarah diharapkan dapat memberikan pengetahuan luar negeri kepada peserta didik secara mendalam, terutama mengenai para tokoh pembawa perubahan. Pembelajaran yang disampaikan merupakan materi yang up to date dan berkesinambungan dengan pembelajaran sejarah kontemporer. Misalnya, masalah penyatuan Korea Utara dengan Korea Selatan, perkembangan senjata nuklir di antara negara maju dan masalah perdamaian di seluruh negara.

Daftar Pustaka

Buku:

Dahlan, Nasution. (1989). *Ilmu Hubungan Internasional Teori Dan Sistem*.
Jakarta: Rajawali

_____. (1984). *Perang Atau Damai Dalam Wawasan Politik Internasional*.
Bandung: CV Ramadja Karya

_____ (1989). *Politik Internasional: Konsep Dan Teori*. Jakarta: Erlangga

Dudung, Abdurrahman. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*.
Jakarta: Logos Wahana Ilmu

Hendarsah, Amir. (2007). *11 Macan Asia Musuh Amerika*. Jogjakarta : Galangpres

Mas'ood, M., (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*. Jakarta:
LP3ES

Selig. S. Harrison. (2002). *Korean Endgame: A Strategy For Reunification And Us Disengagement*. USA: Princeton University Press

Yang. S. Y dan Mas'ood. M. (2003). *Masyarakat Politik Dan Pemerintahan Korea: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Koran:

Oki. (2006, 9 Oktober). *Jika AS Mau Baerunding Uji Coba Baru Nuklir Batal*. KOMPAS, hlm 3.

Gunawan. (2006, 10 Oktober). *Korea Utara Berhasil Tes Senjata Nuklir*. KOMPAS, hlm 1 & 15.

Oki. (2006, 12 Oktober). *Sanksi Baru PBB Ancam Korea Utara*. KOMPAS, hlm9.

Ahn, Young, Joon. (2006. 13 Oktober). *Jepang Khawatir Balasan Korea Utara*. KOMPAS, hlm. 8.

DI. (2003, 12 Mei). *Korut Kembali Mengecam Untuk Mengambil Tindakan Darurat*. KOMPAS, hlm. 3.

Muk. (2005, 28 Juli). *Korut Tuntut AS Singkirkan Nuklir*. KOMPAS

_____. (2005, 27 Juli). *Nuklir Korut Dirundingkan Lagi*. KOMPAS, hlm. 10.

Internet:

Artikel kedokteran. (2012). Dampak Positif dan Negatif dari Nuklir. *Artikel Kedokteran*. Diperoleh 16 April 2012 dari <http://www.artikelkedokteran.com/109/%E2%80%9Cdampak-positif-dan-negatif-dari-nuklir%E2%80%9D.html>

KBS World. (2006). Korean Nuclear. *Korean Broadcasting System*. Diperoleh 1 April 2012 dari http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/news_02.htm

Sarwiyantari, V. Puspita, R. Putu, Eva. W. 2008. Peran Politis-Strategis Nuklir Bagi Korea Utara Dalam Upaya Diplomatik Memenuhi Kepentingan Nasional. *Wordpress*. Diperoleh 5 Mei 2012 dari <http://skiasyik.wordpress.com/2008/04/02/nuklir-korut/>

Sofa. (2006). Biografi Kim Jong Il. *Blog Sofa Asian*. Diperoleh 16 April 2012 dari <http://asianhistorabout.com/od/profilesofasianleaders/p/BioKimJongil.htm>

Wicahyani, A. F. (2010). Dampak Pengembangan Nuklir Korea Utara Terhadap Kompleksitas Keamanan Regional Asia Timur. *Jurnal Lipi*. Diperoleh 16 April 2012. Dari www.isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/41071932_1829-8001_final.pdf